

Lampiran : Keputusan Sekretariat DPRD
Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 14 TAHUN 2016

Tanggal : 21 APRIL 2016

Tentang : Klasifikasi Informasi Publik
Sekretariat DPRD Provinsi
Jawa Tengah

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

A. WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Medis yang Memuat Informasi
1.	Informasi tentang Profil SEKRETARIAT DPRD Provinsi Jawa Tengah						
a.	Visi dan Misi	Kabag. Keuangan	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	2016	Softcopy & hardcopy	5 tahun	www.dprd.jatengprov.go.id
b.	Struktur Organisasi dan profil Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Kabag. Umum	Kasubbag TU dan Kepegawaian	2016	Softcopy & hardcopy	5 tahun	www.dprd.jatengprov.go.id
c.	Sumber Daya Manusia yang dimiliki (jumlah, komposisi, kompetensi pegawai)	Kabag. Umum	Kasubbag TU dan Kepegawaian	2016	Softcopy & hardcopy	5 tahun	www.dprd.jatengprov.go.id
d.	Tugas, wewenang dan fungsi	Kabag. Umum	Kasubbag TU dan Kepegawaian	2016	Softcopy & hardcopy	5 tahun	www.dprd.jatengprov.go.id
2.	Ringkasan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah						
a.	Nama Program dan Kegiatan	Kabag. Keuangan	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	2016	Softcopy & hardcopy	5 tahun	www.dprd.jatengprov.go.id

b.	Penanggungjawab dan pelaksana program	Kabag. Keuangan	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	2016	Softcopy & hardcopy	5 tahun	www.drp.d.jatengprov.go.id
c.	Target dan Capaian program dan kegiatan	Kabag. Keuangan	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	2016	Softcopy & hardcopy	5 tahun	www.drp.d.jatengprov.go.id
d.	Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	Kabag. Keuangan	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	2016	Softcopy & hardcopy	5 tahun	www.drp.d.jatengprov.go.id
e.	Nilai Anggaran	Kabag. Keuangan	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	2016	Softcopy & hardcopy	5 tahun	www.drp.d.jatengprov.go.id
3. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah							
a.	Ringkasan Informasi Kinerja	Kabag. Umum	Kasubag TU dan Kepegawaian	2016	Softcopy & hardcopy	5 tahun	www.drp.d.jatengprov.go.id
b.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Kabag. Umum	Kasubag TU dan Kepegawaian	2016	Softcopy & hardcopy	5 tahun	www.drp.d.jatengprov.go.id
c.	Laporan Pelayanan Informasi Publik	Kabag. Umum	Kasubag TU dan Kepegawaian	2016	Softcopy & hardcopy	5 tahun	www.drp.d.jatengprov.go.id/PapanInformasi
d.	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa	Kabag. Keuangan	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	2016	Softcopy & hardcopy	5 tahun	www.drp.d.jatengprov.go.id/PapanInformasi
e.	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa	Kabag. Keuangan	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	2016	Softcopy & hardcopy	5 tahun	www.drp.d.jatengprov.go.id/PapanInformasi
f.	Pengumuman Proses Pengadaan	Kabag. Keuangan	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	2016	Softcopy & hardcopy	5 tahun	www.drp.d.jatengprov.go.id/PapanInformasi

B. WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Medis yang Memuat Informasi
1.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025	Kabag. Keuangan	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	2016	Softcopy & hardcopy	5 tahun	www.drp.d.jatengprov.go.id
2.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2008 – 2013	Kabag. Keuangan	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	2016	Softcopy & hardcopy	5 tahun	www.drp.d.jatengprov.go.id
3.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013 - 2018	Kabag. Keuangan	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	2013	Softcopy & hardcopy	5 tahun	www.drp.d.jatengprov.go.id
4.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2013	Kabag. Keuangan	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	2012	Softcopy & hardcopy	5 tahun	www.drp.d.jatengprov.go.id
5.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2014	Kabag. Keuangan	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	2013	Softcopy & hardcopy	5 tahun	www.drp.d.jatengprov.go.id
6.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Kabag. Keuangan	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	2014	Softcopy & hardcopy	5 tahun	www.drp.d.jatengprov.go.id

	(RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2015						
7.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2016	Kabag. Keuangan	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	2015	<i>Softcopy & hardcopy</i>	5 tahun	www.drp.d.jatengprov.go.id
8.	Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016	Kabag. Keuangan	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	2015	<i>Softcopy & hardcopy</i>	5 tahun	www.drp.d.jatengprov.go.id
9.	Rencana Kerja DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	Kasubbag Perundang-undangan	2016	<i>Softcopy & hardcopy</i>	5 tahun	www.drp.d.jatengprov.go.id
10	Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	Kasubbag Perundang-undangan	2016	<i>Softcopy & hardcopy</i>	5 tahun	www.drp.d.jatengprov.go.id

C. WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

No	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Medis yang Memuat Informasi
1.	Prosedur dini dan evakuasi keadaan darurat kebakaran gedung	Kabag Umum	Kasubbag Rumah Tangga	2016	<i>Softcopy & hardcopy</i>	5 tahun	Website

II. INFROMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Alasan Informasi Yang Dikecualikan	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Jika Informasi Dibuka	Manfaat Jika Informasi Ditutup
1.	Biodata PNS	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28a s.d 28h - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h 	Melindungi Hak dasar Manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Dokumen/berkas/arsip PNS	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28a s.d 28h - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h 	Melindungi Hak dasar Manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas		Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28a s.d 28h - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h 	Melindungi Hak dasar Manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas		Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28a s.d 28h - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h 	Melindungi Hak dasar Manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas		Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5.	Daftar nilai DP-3 PNS	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28a s.d 28h - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h - PP No. 10 Tahun 1979 	Melindungi Hak dasar Manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas		Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

		Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6				
6.	Data rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28a s.d 28h - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h - Permenkes RI No. 269/menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis (pasal 10) 	Melindungi Hak dasar Manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan data pribadi PNS - Dapat merugikan PNS - Melanggar HAM 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Untuk melindungi keamanan dan kenyamanan PNS
7.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28a s.d 28h - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i - PP No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS	Terbatas sampai dengan Pelantikan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 	Menjaga kondusivitas, keamanan dan kepastian hukum
8.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 	Melindungi kerahasiaan dokumen
9.	Dokumen penawaran kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28a s.d 	Untuk menjamin persaingan	Terbatas sampai dengan	<ul style="list-style-type: none"> - Muncul persaingan usaha yang 	Dapat menjaga obyektifitas

	<p>28h</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan huruf j - Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah 	<p>usaha yang sehat</p>	<p>proses pengadaan barang/jasa selesai</p>	<p>tidak sehat</p>	<p>penilaian</p>
--	--	-------------------------	---	--------------------	------------------

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Indra Surya
INDRA SURYA